

PENERIMAAN MASYARAKAT ATAS KEBIJAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI

PUBLIC ACCEPTANCE OF PEDULI LINDUNGI APPLICATION USAGE POLICY

Arsenius Wisnu Aji Patria Perkasa,* Maria Puspitasari

Prodi Kajian Ketahanan Nasional, SKSG, Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat

*Koresponden email: arseniuswisnu@gmail.com

ABSTRAK

Aplikasi PeduliLindungi merupakan sebuah bentuk respon Pemerintah Indonesia dalam rangka mengatasi ancaman pandemi Covid-19. Aplikasi ini digunakan sebagai instrumen untuk melacak persebaran virus Covid-19 di Indonesia yang dilakukan bersamaan dengan kebijakan publik berupa pembatasan mobilitas masyarakat. Muncul penerimaan dan penolakan masyarakat terhadap kebijakan PeduliLindungi yang berlaku. Dengan metode studi kasus dan pengumpulan data melalui observasi pada media sosial *Twitter*, ditemukan bahwa masyarakat memiliki persepsi pro dan kontra mengenai aplikasi PeduliLindungi. *Rational choice theory* dalam hal ini digunakan untuk menjelaskan keputusan masyarakat untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, penggunaan aplikasi dimotivasi oleh keinginan seseorang untuk beraktivitas di ruang-ruang publik. Sebagian memiliki persepsi positif yang menganggap bahwa aplikasi PeduliLindungi membantu proses pelacakan dan memberikan jaminan rasa aman dalam beraktivitas. Di sisi lain, terdapat kelompok yang menganggap bahwa aplikasi PeduliLindungi dapat mempersulit dan mengancam mereka. Hal ini menyebabkan kelompok ini memilih untuk menghindari dari kebijakan tersebut dengan cara (1) mengunduh aplikasi di saat-saat tertentu saja, dan (2) penggunaan aplikasi pihak ketiga yang telah terintegrasi dengan sistem PeduliLindungi. Selain dua kelompok yang berbeda pendapat, pro dan kontra, terdapat kelompok lain yang tidak mengunduh aplikasi PeduliLindungi karena alasan keterbatasan gawai yang dimilikinya.

Kata Kunci: Kebijakan Publik; PeduliLindungi; Penerimaan; Persepsi; Teori Pilihan Rasional

ABSTRACT

*PeduliLindungi application is a form of response of the Government of Indonesia in order to overcome the threat of the Covid-19 pandemic. This application used as an instrument to track the spread of the Covid-19 virus in Indonesia which is carried out in conjunction with public policy in the form of restrictions on community mobility. Emerging public acceptance and rejection about the applicable of PeduliLindungi policy. With the case study method and data collection through observations on social media *Twitter's*, it was found that the public had pros and cons perceptions about the application. *Rational choice theory* in this case is used to explain people's decision to use *PeduliLindungi* application. Based on data analysis that has been done, the use of applications is motivated by one's desire to move in public spaces. Some have positive perceptions that assume that *PeduliLindungi* application helps the tracking process and provides a guarantee of security in the move. On the other hand, there are groups that consider that *PeduliLindungi* application can complicate and threaten them. This causes this group to choose to avoid the policy by (1) downloading the application at certain times only, and (2) use of third-party applications that have been integrated with the *Care Protect* system. In addition to the two groups of different opinions, pros and cons, there are other groups that do not download *PeduliLindungi* application for reasons of limited device.*

Keywords: *Acceptance; PeduliLindungi; Perceptions; Public Policy; Rational Choice Theory*

PENDAHULUAN

Berbagai macam kebijakan publik muncul dalam rangka menangani kasus pandemi Covid-19 yang telah terjadi sejak 31 Desember 2019. Salah satu bentuk kebijakan publik sebagai respon negara-negara di dunia adalah karantina wilayah,

atau *lockdown*, secara nasional. Peme-rintahan Tiongkok menjadi negara pertama yang melakukan karantina wilayah dengan cara melarang perjalanan atau berkegiatan di luar rumah bagi warga negaranya dan banyak menutup tempat umum (Sebayang, 2020). Hal yang sedikit

berbeda terjadi di Inggris dimana pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap berada di rumah serta hanya berkegiatan jika diperlukan, seperti membeli kebutuhan makanan dan keperluan medis (Hamzelou, 2020). Terdapat sedikit perbedaan kebijakan publik yang terjadi di dalam dua negara tersebut. Walau demikian, pembatasan ruang gerak masyarakat di dalam ruang-ruang publik tetap terjadi karena kedua negara tersebut mengalami ancaman yang sama.

Selain Tiongkok dan Inggris, pandemi Covid-19 juga berdampak pada seluruh negara di dunia. Pandemi Covid-19 merupakan bencana yang tidak terduga. Tingginya tingkat infeksi, okupansi rumah sakit, dan kematian (Warren, Lofstedt, & Wardman, 2021) yang disebabkan oleh Covid-19 akhirnya mengubah tatanan ekonomi, sosial, budaya, dan seluruh aspek kehidupan manusia dan menyebabkan ancaman global. Akhirnya banyak negara yang memberlakukan karantina wilayah karena pembatasan mobilitas masyarakat dinilai tidak bisa menghambat laju infeksi Covid-19 (Hamzelou, 2020).

Ternyata kebijakan publik berupa pembatasan dan karantina wilayah ini menyebabkan peningkatan gangguan psikologis berupa gejala kesehatan mental. Mengacu pada penelitian milik (Brooks et al., 2020) karantina wilayah memperkuat gangguan psikologis seseorang sehingga akhirnya kebijakan ini memiliki dampak buruk lain bagi masyarakat. Gejala penguatan gangguan psikologis tersebut umumnya berupa peningkatan rasa cemas dan depresi di dalam masyarakat (Brooks et al., 2020; Holmes et al., 2020). Oleh karena itu kebijakan publik untuk merespon pandemi Covid-19 merupakan hal yang rumit karena pembatasan mobilitas masyarakat kurang efektif, namun di sisi lain karantina wilayah dapat menyebabkan gangguan psikologis masyarakatnya.

Berbeda dengan beberapa negara-negara lain yang menerapkan karantina wilayah, respon Indonesia untuk menangani pandemi Covid-19 adalah pemberlakuan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat. Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa karantina wilayah tidak dapat menjamin penyelesaian pandemi, serta adanya aspek sosial dan budaya di Indonesia yang harus dipertimbangkan (Pranita, 2020). Meski demikian, cepatnya penyebaran virus Covid-19 yang mengancam Indonesia pada akhirnya menyebabkan Pemerintah menggolongkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional (Utami, Pinzon, & Meliala, 2021). Hingga akhirnya per Maret 2020,

Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan untuk membatasi mobilitas masyarakat dengan nama “Pembatasan Sosial Skala Besar”, atau PSBB (Junaedi dan Salistia, 2020). Terminologi PSBB ini terus dilakukan pergantian nama seiring berjalannya waktu, dengan mengacu pada durasi waktu pelaksanaan kebijakan publik (Andryanto, 2021).

Sebagai bagian dari upaya mitigasi lainnya, negara-negara di dunia mengembangkan sebuah aplikasi untuk melacak persebaran virus Covid-19. Respon ini bertujuan untuk melindungi dan mendukung mobilitas masyarakat yang sempat terhenti karena pandemi. Beberapa negara-negara yang menggunakan aplikasi pelacakan tersebut adalah Australia dengan aplikasi *COVIDsafe*, Israel dengan *Hamagen* (Li & Guo, 2020), Singapura dengan aplikasi *SafeEntry* yang terintegrasi dengan *TraceTogether*, Inggris dengan aplikasi *NHS Covid-19*, Selandia Baru dengan aplikasi *NZ COVID Tracer*, dan Irlandia dengan aplikasi *Digital COVID Certificate Checker* (Simorangkir, 2021). Pengembangan aplikasi ini merupakan respon pendukung kebijakan pembatasan mobilitas bagi negara-negara dalam menangani dan tetap bertahan di tengah ancaman pandemi Covid-19.

Pemerintah Indonesia juga melakukan hal serupa dengan meluncurkan aplikasi *Trace-together* untuk melacak penyebaran pandemi Covid-19. Namun, adanya kemiripan nama dan fungsi dari aplikasi milik negara Singapura menyebabkan aplikasi *Tracetgether* di Indonesia digantikan oleh PeduliLindungi (Jemadu & Prastya, 2021). Aplikasi yang dibuat melalui kerja sama antara KOMINFO dengan Aptika, Kementerian Kesehatan, dan Telkom ini menjadi bagian dalam standar dasar proses pelacakan warga negara untuk mengamankan warga dari resiko penularan Covid-19. Masyarakat diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi dalam setiap kegiatannya di ruang publik. Aplikasi ini mencermati pergerakan masyarakat yang terintegrasi dengan *server* dalam sebuah sistem *big data* pada Kementerian Kesehatan, yaitu *New All Record* atau NAR (Sitompul, Meilani, Salsabila, & Hariwangi, 2021). Dengan kata lain, aplikasi PeduliLindungi digunakan sebagai alat pelacak persebaran Covid-19 secara nasional sebagai standar perjalanan yang wajib bagi masyarakat Indonesia. Hal yang sama juga berlaku pada beberapa negara lainnya dengan

menggunakan aplikasi yang dikembangkan masing-masing negara.

Meski demikian, aplikasi PeduliLindungi memiliki sejumlah masalah selama masa pengembangan produk hingga penggunaannya. Salah satunya adalah banyaknya izin akses yang diperlukan dalam menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Beberapa permasalahan pada masa awal aplikasi PeduliLindungi adalah kewajiban untuk mengaktifkan *Global Positioning System*, atau GPS, aktif selama 24 jam, aplikasi yang sering berhenti beroperasi, OTP sering gagal terkirim, dan pengumpulan *IP address* untuk mengidentifikasi perangkat pengguna (Rachmatunnisa, 2021). Fitur-fitur ini menimbulkan masalah penggunaan baterai yang boros dan kekhawatiran terjadi penyalahgunaan data melalui aplikasi PeduliLindungi.

Salah satu hal yang sempat menjadi wacana yang meresahkan masyarakat adalah isu kebocoran data pribadi. Mengenai hal ini, penelitian dari (Wijayanto, Daryono, & Nasiroh, 2021) dengan analisis forensik berupa teknik statis dan dinamis, menjelaskan bahwa aplikasi PeduliLindungi tidak memiliki potensi kebocoran data karena tidak ditemukan *malware* dan *database* yang tersimpan di dalam aplikasi. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa aplikasi PeduliLindungi tidak memiliki masalah keamanan pada tahap pemrograman. Meski demikian, kasus kebocoran sertifikat vaksin dosis kedua milik Presiden Indonesia saat ini, Joko Widodo (Disantara et al., 2021), sempat memunculkan ketidakpercayaan yang sangat besar di masyarakat. Dengan rendahnya literasi digital masyarakat dan munculnya isu ini, tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah maupun aplikasi PeduliLindungi akhirnya menjadi terancam (Rahman, 2021).

Respon dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam menggunakan aplikasi PeduliLindungi akhirnya menyebabkan Pemerintah Indonesia memperbaiki aplikasi tersebut. Aplikasi yang ditakutkan tersebut merupakan versi 2.2.2 yang muncul pada 25 Juni 2020. Sedangkan aplikasi yang saat ini berjalan merupakan versi 3.1.1 yang sudah disempurnakan bagi pengguna Android berupa peniadaan fitur izin akses *bluetooth*, kamera, dan *wireless fidelity*, atau WiFi, dan akses data penyimpanan yang harus aktif setiap saat (Dwinanda, 2021). Aplikasi PeduliLindungi juga diberikan pembaruan secara berkala oleh KOMINFO. Dengan

kata lain, Pemerintah Indonesia tetap berusaha untuk menjalankan kebijakan yang telah dibuat dengan cara memperbaiki aplikasi PeduliLindungi berdasarkan kebutuhan pemerintah dan respon masyarakat.

Komunikasi bencana merupakan hal yang sangat penting. Seperti yang tertulis di dalam penelitian terdahulu milik Putri dan Hamzah (2021), komunikasi bencana yang baik dapat memberikan pengetahuan terhadap publik terkait bencana serta mempersiapkan masyarakat dalam rangka bertahan di dalam keadaan bencana. Informasi tentang pemberlakuan PSBB dikomunikasikan oleh pemerintah pada akhirnya digabungkan dengan penerapan kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi dalam rangka melacak penyebaran Covid-19 secara nasional. Di dalam penerapan aplikasi PeduliLindungi, Herdiana (2021) mengatakan bahwa terdapat tiga aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu (1) **Sistem**, terdiri dari jaminan keamanan data dan aksesibilitas yang mudah; (2) **Pemerintah**, terdiri dari pengelolaan, koordinasi, dan pertanggungjawaban yang baik; dan (3) **Masyarakat**, terdiri dari jaminan keakuratan data dan alternatif akses bagi masyarakat yang tidak memiliki gawai elektronik.

Aplikasi PeduliLindungi digunakan sebagai aplikasi yang memberi informasi terkait Covid-19 di wilayah sekitar pengguna, pemberian peringatan secara personal, pengawasan keamanan pengguna dari Covid-19, pengunduhan sertifikat vaksin, pusat informasi hasil tes Covid-19 pengguna, serta bukti untuk mengakses layanan publik (covid19.go.id) telah menjadi alasan mendasar mengapa aplikasi ini dikembangkan. Penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat wajib dalam mengakses ruang publik dalam hal ini harus mempertimbangkan ketiga aspek tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dkk. (2020), kemudahan penggunaan, atau *user friendly*, memiliki dampak yang paling dominan terkait penerimaan aplikasi PeduliLindungi bagi masyarakat secara umum. Hal tersebut juga harus didukung oleh jaminan keamanan data yang dimiliki oleh individu karena pada kenyataannya hal ini juga memiliki dampak terhadap penerimaan aplikasi PeduliLindungi. Walau begitu, penelitian Kurniawati dkk. (2020) hanya berfokus pada aspek sistem dari aplikasi PeduliLindungi dan tidak menganalisis bagaimana keterkaitan antara aplikasi

PeduliLindungi, masyarakat, dan Pemerintah Indonesia.

Terdapat aspek pilihan rasional individu yang harus dipertimbangkan dalam proses penerimaan masyarakat terhadap sebuah kebijakan publik. *Rational Choice Theory*, atau RCT, muncul karena seorang individu dianggap sebagai aktor rasional yang mendasarkan pilihannya pada penghitungan yang rasional dari segala informasi yang tersedia baginya (Ganti, 2021). Individu dilihat sebagai pihak yang termotivasi oleh keinginan atau tujuannya dan akhirnya mengekspresikan preferensi individu sesuai dengan pilihan yang tersedia (Scott, dalam Browning, Halcli, & Webster, 2000). Keberadaan *rewards* dan *punishment* dianggap sebagai motivasi seseorang dalam menentukan suatu keputusan karena konsep ini memperhitungkan keuntungan dan kerugian dalam sebuah pilihan yang dapat diambil oleh seseorang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dan motivasi masyarakat terkait penerimaan penggunaan aplikasi PeduliLindungi, terlepas dari berbagai macam masalah yang muncul dari aplikasi tersebut. Tujuan ini juga merupakan pembeda dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya sebab penelitian yang tersedia memiliki fokus pada aspek keamanan sistem digital dan komunikasi publik terkait kebijakan aplikasi PeduliLindungi.

METODE

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi literatur melalui media sosial, yaitu *Twitter*, yang berkaitan dengan respon masyarakat mengenai aplikasi PeduliLindungi.

Data yang didapatkan akan digunakan untuk memetakan persepsi dan motivasi seseorang terkait kebijakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk mengakses fasilitas publik di masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini akan berfokus pada pemantauan proses penerimaan kebijakan pasca komunikasi kebijakan publik yang bersifat retrospektif, dengan rentang data dari bulan Agustus hingga Desember 2021. Periode ini diambil karena Agustus 2021 merupakan awal penetapan kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi di dalam ruang publik. Sedangkan Desember 2021 merupakan kemunculan sanksi administratif jika masyarakat Indonesia tidak

menggunakan aplikasi PeduliLindungi selama masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Briantika, 2021).

Model analisis yang digunakan adalah analisis teks, atau *Content Analysis*, sebagai teknik yang digunakan untuk menjelaskan isi dan karakteristik dari sebuah pesan secara objektif dan sistematis (Bryman, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Indonesia telah mewajibkan program vaksinasi Covid-19 dalam rangka menangani kasus Pandemi Covid-19 yang telah muncul sejak akhir tahun 2019. Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, atau KPC-PEN, Airlangga Hartanto, menyatakan bahwa vaksinasi ini wajib karena dapat menjangkau masyarakat luas (Farisa, 2021). Selain itu, arahan ini telah dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular. Setelah seseorang menerima vaksin, maka pembuktiannya akan diberikan melalui pemberian sertifikat vaksin untuk dua (2) kali dosis yang diterima oleh seseorang. Akibatnya, masyarakat Indonesia yang ingin beraktivitas di luar rumah diwajibkan untuk menunjukkan sertifikat vaksin Covid-19 (Bepa, Salma, & Aparacitta, 2022) sebagai bukti bahwa dirinya telah mengikuti program vaksinasi.

Pada masa-masa awal program vaksinasi, masyarakat memilih untuk mengunduh dan mencetak sertifikat vaksin. Kebijakan ini akhirnya diperbarui sejak tanggal 28 Agustus 2021 menjadi kewajiban untuk menunjukkan sertifikat vaksin via aplikasi PeduliLindungi secara langsung, serta *scan barcode* untuk *check-in* dan *check-out* di setiap fasilitas publik yang ingin mereka akses (Clinten, 2021). Aturan ini tertuang di dalam Keputusan Menteri Kominfo Nomor 171 Tahun 2020 sebagai dasar bagi Pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan proses *tra-cing*, *tracking*, dan *fencing*.

Kebijakan baru ini akhirnya disosialisasikan dari beberapa hari sebelum diwajibkan, termasuk beragam perkembangan kebijakan aplikasi PeduliLindungi lainnya melalui berbagai media daring di Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam hal ini berusaha untuk mempercepat program vaksinasi dan mengelola mobilitas masyarakat di tengah pandemi Covid-19 melalui penerapan aplikasi PeduliLindungi (Fastyaningsih, Priyantika, Widyastuti, Kismartini, & Herawati, 2021). Sosialisasi yang dilakukan adalah dengan

kali jika ia masuk ke dalam bioskop atau tempat makan.

PeduliLindungi merupakan sebuah produk kebijakan publik yang berhasil jika mengacu pada banyaknya jumlah ruang publik yang diwajibkan menggunakan aplikasi Peduli-Lindungi untuk dapat diakses, dan melalui tujuh (7) kata terbesar di dalam visualiasi *word cloud*. Tentu keberhasilan ini tidak bisa dilepaskan dari proses evaluasi dan perbaikan kebijakan publik yang dikomunikasikan oleh Pemerintah Indo-nesia. Pemberitaan terkait dimulainya kebijakan dan segala perubahan yang terjadi akhirnya diberitakan secara terus-menerus melalui media daring. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan berusaha memahami permasalahan yang dialami oleh masyarakat dalam menjalankan kebijakan yang telah disahkan. Salah satunya adalah kerja sama dengan aplikasi pihak ketiga yang memungkinkan masyarakat untuk menggunakan PeduliLindungi tanpa harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi secara langsung. Dengan adanya kerja sama dengan pihak ketiga, Pemerintah Indonesia berharap permasalahan yang dialami oleh masyarakat terkait aplikasi PeduliLindungi dapat terselesaikan. Terdapat penyesuaian dari kebijakan yang telah ada dan hal ini juga diberitakan kepada masyarakat. Oleh karena itu, proses komunikasi kebijakan publik yang telah dilakukan memiliki kecenderungan informasi yang simetris. Hal ini berkaitan dengan proses sosialisasi manfaat, perbaikan aplikasi, dan dampak perubahan yang terjadi secara umum selama kebijakan PeduliLindungi berlangsung.

Merujuk pada teori pilihan rasional, masyarakat Indonesia memiliki pilihan bebas untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi Peduli-Lindungi yang dapat dipilih secara rasional. Terdapat proses komunikasi kebijakan agar masyarakat mendapatkan informasi terkait kebijakan PeduliLindungi. Proses ini memberikan peluang bagi seseorang untuk menghitung keuntungan dan kerugian dalam mematuhi kebijakan tersebut. Dengan mendapatkan informasi terkait keunggulan dan permasalahan yang dimiliki oleh aplikasi PeduliLindungi, muncul biaya yang harus dibayar seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkannya.

Proses komunikasi kebijakan ini melahirkan opini pro dan kontra di dalam masyarakat Indonesia. Opini pro atau dukungan muncul dari kelompok masyarakat yang merasa terbantu dan dipermudah untuk berkegiatan di luar rumah

selama masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa *tweet* seperti dari @lusyant yang mengatakan, “*Setuju sih dengan ini. Ke depannya memang semua akan serba digital. Validasi vaksin dan PCR di Peduli Lindungi bisa jadi acuan. Jelas memudahkan. Soal keamanan data ya kita serahkan ke ahlinya*”. Ia beranggapan bahwa aplikasi PeduliLindungi terbukti membantu dirinya dalam beraktivitas sehari-hari di luar ruangan dan perkembangan digital ini akhirnya berdampak positif bagi dirinya. Hal ini juga terjadi bagi @soleiletrouge yang menulis, “*okelah latah, tp jujur gue puas sih sejauh ini, krn membantu gue bgt yg gamau ribet*”. Terlihat bahwa opini pro dan dukungan muncul di dalam masyarakat karena seseorang merasa terbukti dipermudah aktivitasnya selama masa PSBB.

Walaupun begitu, terdapat opini kontra di balik keberhasilan dan dukungan penerapan PeduliLindungi sebagai kebijakan publik di Indonesia. Aplikasi PeduliLindungi dianggap memiliki berbagai macam permasalahan dan memunculkan biaya yang lebih besar. Masalah-masalah aplikasi PeduliLindungi yang terpetakan oleh *word cloud* menurut masyarakat Indonesia adalah “kebocoran data”, “hp” (atau gawai), “hp hang” (atau gawai tidak merespon sentuhan pemilik), “hp jadul” (atau gawai tua yang spesifikasinya kurang memadai), dan eror (atau tidak dapat menggunakan aplikasi). Dapat disimpulkan bahwa terdapat masyarakat yang memiliki keterbatasan gawai dan ketakutan akan kebocoran data yang berpotensi terjadi pada dirinya jika ia menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Munculnya pemberitaan terkait kebocoran sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo semakin memperkuat ketakutan masyarakat terkait keamanan dan kerahasiaan data pribadi. Akibat kasus tersebut, muncul *tweet* dari @AREAJULID berupa, “*Dis! Punya presiden aja bocor apalagi orang biasa kayak kita*”. Terlihat bahwa kasus kebocoran data pribadi yang dialami oleh Presiden Indonesia menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengamanan data pribadi karena suatu saat bisa saja data-data pribadi dirinya yang bocor ke publik.

Permasalahan lainnya adalah optimalisasi aplikasi PeduliLindungi yang masih kurang. Salah satu indikator optimalisasi yang kurang adalah *hang*, atau eror, yang dialami oleh gawai seseorang. Ditambah lagi gawai lama dan gawai lain yang tidak menggunakan OS GMS maupun

iOS pada akhirnya tidak dapat menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Seperti yang disampaikan oleh @NrGoodNorBad di dalam *tweet*-nya, “*Saya punya hp Huawei p30 pro, install pedulilindungi saja gak bisa. Aplikasi paling sampah ya ini sudah*”. Masalah yang dialami oleh @NrGoodNorBad disebabkan oleh gawai dengan merek Huawei telah merubah OS-nya dari GMS menjadi *HUAWEI Mobile Services*, atau HMS. Perubahan ini dilakukan oleh Huawei sejak 2019 untuk gawai-gawai dengan tahun produksi 2019 ke atas (Bestari, 2021). Hal ini mengakibatkan masyarakat yang gawainya tidak menggunakan OS GMS maupun iOS pada akhirnya tidak bisa mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Hal ini menyebabkan masyarakat yang menolak aplikasi PeduliLindungi melakukan tindakan yang irasional, yaitu pemanfaatan celah untuk tetap diperbolehkan beraktivitas di luar rumah seperti kelompok pendukung kebijakan publik. Berkaca pada data yang telah dikumpulkan, terdapat dua teknik penghindaran yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok penentang aplikasi PeduliLindungi. Penghindaran pertama adalah pengunduhan aplikasi hanya saat ingin beraktivitas di ruang publik. Sebuah *tweet* milik @catmerade menyuarakan pendapat berupa, “*install peduli lindungi – scan – masuk mall – jalan2 – keluar mall/check out - uninstall*”. Selain itu, *Tweet* milik @damprad yang berisi, “*komunitas baru banget install aplikasi pedulilindungi sebelum nglewatin pintu masuk mall*”. Opini tersebut juga serupa dengan *tweet* dari @sarpavra yang berisi, “*Busuk kali ini app pedulilindungi Kalau ga krn spiderman bsk ndeuh*”. Terlihat bahwa ketiga opini ini berfokus pada pilihan seseorang untuk mengunduh aplikasi PeduliLindungi karena adanya keterpaksaan saat mereka ingin mengakses ruang publik dan melepasnya setelah ia tidak memerlukan aplikasi tersebut. Individu tersebut akhirnya memilih untuk mengunduh aplikasi PeduliLindungi karena adanya keinginan untuk mendapatkan suatu keuntungan, seperti @catmerade dan @damprad yang ingin masuk mall dan @sarpavra yang ingin diperbolehkan masuk bioskop dan menonton film *Spiderman*. Ketiga opini ini mencerminkan dorongan emosional seseorang yang dapat memengaruhi keputusan rasionalnya terkait dengan penolakan individu atas penerapan kebijakan aplikasi PeduliLindungi.

Sedangkan penghindaran kedua merupakan kesempatan yang dilegitimasi oleh Pemerintah Indonesia, yaitu kerja sama pemerintah dengan aplikasi pihak ketiga. Pembaruan kebijakan ini muncul karena Pemerintah Indonesia melihat bahwa masyarakat pada kenyataannya mengalami permasalahan tertentu saat ingin mematuhi kebijakan penerapan aplikasi PeduliLindungi. Cara ini akhirnya digunakan oleh @titanrahadian melalui *tweet*-nya, “*Sekarang saya ngga pake aplikasi itu., bisa pake aplikasi e-commerce aja lumayan mengurangi space*”. Melalui *tweet* tersebut, penggunaan aplikasi-aplikasi pihak ketiga yang telah terintegrasi dengan PeduliLindungi, seperti aplikasi *e-commerce*, Tokopedia, Traveloka, Grab, Gojek, dan JAKI; dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk penghindaran yang diizinkan oleh Pemerintah Indonesia.

Masyarakat melakukan sebuah reaksi untuk mendapatkan keinginannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagi seluruh masyarakat, penggunaan aplikasi PeduliLindungi merupakan hal yang wajib saat seseorang ingin beraktivitas di luar rumah. Ada beberapa orang yang menganggap bahwa kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi merupakan sebuah hukuman, atau *punishment*. Ada juga yang memiliki opini bahwa ancaman sanksi pidana saat seseorang tidak menggunakan aplikasi PeduliLindungi merupakan sebuah hukuman. Saat seseorang ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkannya berupa “jalan-jalan”, maka ia akan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Ini merupakan aspek rasionalitas yang dipilih oleh seseorang karena ia ingin mendapatkan keinginannya, atau *reward*. Masyarakat membuat keputusan untuk menggunakan atau tidak menggunakan aplikasi yang didasarkan pada semua informasi di media dan internet di dalam penghitungannya sendiri. Dengan informasi yang baik, seseorang dengan sadar memilih untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai salah satu syarat utama jika mereka ingin bebas bepergian. Hal ini berbeda bagi orang yang mendapat informasi buruk. Seseorang akhirnya menolak untuk menggunakan aplikasi tersebut dengan melakukan penghindaran tertentu.

Terkait dengan aspek individualitas, masyarakat memiliki preferensi tertentu dalam menyesuaikan diri ke dalam kebijakan publik. Ada yang mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Terdapat pula pilihan lain be-

rupa penggunaan aplikasi pihak ketiga yang telah terintegrasi dengan *server* PeduliLindungi. Sedangkan aspek temporalitas, mengacu pada aturan kewajiban untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi selama masa Pandemi Covid-19 yang masih berlaku hingga saat ini.

Terlihat bahwa keberhasilan kebijakan publik berupa penggunaan aplikasi Peduli-Lindungi sangat bergantung pada informasi yang jelas dan menunjukkan kemanfaatan praktis dari kebijakan tersebut. Gabungan kedua pola tersebut merupakan kunci dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia agar masyarakat tetap menjalankan kebijakan publik yang telah dibuat. Selain itu, diperlukan konsistensi dan peningkatan layanan aplikasi PeduliLindungi, khususnya kemudahan penggunaan dan jaminan keamanan data pribadi, agar kebijakan publik ini tetap berjalan dan diterima dengan baik. Perbaikan-perbaikan tersebut merupakan faktor penunjang yang akhirnya akan berdampak pada keberhasilan penerapan kebijakan publik PeduliLindungi di masa pandemi Covid-19.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemantauan proses penerimaan kebijakan pasca komunikasi, dapat dikatakan kebijakan penerapan aplikasi PeduliLindungi telah memenuhi standar kebijakan publik. Adanya proses evaluasi dan perbaikan aplikasi juga berdampak positif terhadap kepatuhan masyarakat Indonesia. Hal ini tentu didukung oleh aturan hukum yang memaksa, informasi yang diterima masyarakat, dan peningkatan layanan dalam menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Meski demikian, penggunaan aplikasi dimotivasi oleh keinginan seseorang untuk beraktivitas di ruang-ruang publik. Terdapat perbedaan opini pemanfaatan pada saat pengimplementasian kebijakan publik. Sebagian memiliki persepsi positif yang secara rasional menganggap bahwa aplikasi PeduliLindungi membantu proses pelacakan dan memberikan jaminan rasa aman dalam beraktivitas. Sedangkan kelompok yang kontra cenderung melakukan tindakan irasional, dengan cara melakukan penghindaran agar seseorang dapat menjalankan aktivitas di ruang publik tanpa terkendala.

Beberapa alasan masyarakat tidak mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi adalah tidak adanya dukungan sistem operasi gawai, penggunaan daya gawai yang boros,

interface aplikasi PeduliLindungi yang dianggap buruk, dan kebocoran data pribadi. Oleh karena itu muncul dua bentuk penghindaran kebijakan, yaitu (1) mengunduh aplikasi di saat-saat tertentu saja, dan (2) penggunaan aplikasi pihak ketiga yang telah terintegrasi dengan sistem Peduli-Lindungi. Penghindaran kedua cenderung bersifat menyubstitusi peran aplikasi PeduliLindungi yang dilegitimasi oleh Pemerintah Indonesia dalam proses pembaruan kebijakan publik.

Masyarakat Indonesia akhirnya memiliki informasi dan pilihan lain yang dapat disesuaikan dengan rasionalitas dan individualitas untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Penghitungan untung rugi berdasarkan rasionalitas pribadi yang dilakukan pada akhirnya membentuk preferensi yang berbeda, dalam rangka mendapatkan keinginan dan keuntungan yang diharapkan serta tidak mendapatkan hukuman selama proses tersebut berlangsung. Dengan kata lain, motivasi seseorang mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi maupun aplikasi pihak ketiga yang terintegrasi dengan PeduliLindungi tidak didasarkan pada kesadaran akan pentingnya kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andryanto, S. D. (2021, July 23). Gonta-ganti Istilah Penanganan Covid-19: PSBB Hingga Terkini PPKM Level 4. Retrieved from <https://Nasional.Tempo.Co/Read/1486390/Gonta-Ganti-Istilah-Penanganan-Covid-19-Psbb-Hingga-Terkini-Ppkm-Level-4>.
- Azizah, K. N. (2021, September 28). Bulan Depan, Naik KA dan Pesawat Tak Wajib Punya Aplikasi PeduliLindungi. Retrieved from <https://Health.Detik.Com/Berita-Detikhealth/d-5743016/Bulan-Depan-Naik-Ka-Dan-Pesawat-Tak-Wajib-Punya-Aplikasi-Pedulilindungi>.
- Bepa, C. M., Salma, S. J., & Aparacitta, Y. (2022). Efektivitas Instruksi dan Surat Edaran Menteri terhadap Kewajiban Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi. *Jurist-Diction*, 5(1), 35. Retrieved from <https://doi.org/10.20473/jd.v5i1.32868>
- Bestari, N. P. (2021, June 3). Huawei Resmi 'Ceraikan' Android, Pakai HarmonyOS di Ponselnya. Retrieved from <https://Www.Cnbcindonesia.Com/Tech/20210603083113-37-250182/Huawei-Resmi->

- Ceraikan-Android-Pakai-Harmonyos-Di-Ponselnya.*
- Briantika, A. (2021, December 24). Masalah di Balik Sanksi Pidana bagi Warga Tak Pakai PeduliLindungi. Retrieved from <https://Tirto.Id/Masalah-Di-Balik-Sanksi-Pidana-Bagi-Warga-Tak-Pakai-Pedulilindungi-Gmyl>.
- Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., & Rubin, G. J. (2020, March 14). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. *The Lancet*. Lancet Publishing Group. Retrieved from [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30460-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30460-8)
- Browning, G., Halcli, A., & Webster, F. (2000). *Understanding Contemporary Society: Theories of the Present* (1st ed.). London: Sage Publications Ltd.
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods* (4th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Clinton, B. (2021, August 11). Cara Melihat Sertifikat Vaksin dan Scan QR Code di Aplikasi PeduliLindungi sebagai Syarat Masuk Mal. Retrieved from https://Tekno.Kompas.Com/Read/2021/08/10/09050037/Cara-Melihat-Sertifikat-Vaksin-Dan-Scan-Qr-Code-Di-Aplikasi-Pedulilindungi?Utm_source=dlvr.It&utm_medium=twitter.
- Disantara, F. P., Joansyah, D., Wildani, S., Fatikhatul, A. L., Yustiningrum, A., & Fefty, D. (2021). Tripartite Collaborative Institutions: Skema Konvergensi Institusi Untuk Mewujudkan Ketahanan Siber Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 18(2), 194–215. Retrieved March 30, 2022 from <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i2.3641>.
- Dwinanda, R. (2021, January 5). PeduliLindungi Matikan Fitur Bluetooth, Kamera dan WiFi. Retrieved from <https://Www.Republika.Co.Id/Berita/Qmgfe k414/Pedulilindungi-Matikan-Fitur-Bluetooth-Kamera-Dan-Wifi>.
- Farisa, F. C. (2021, January 8). Pemerintah Tegaskan Masyarakat Wajib Divaksinasi Covid-19. Retrieved from <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2021/01/08/13411591/Pemerintah-Tegaskan-Masyarakat-Wajib-Divaksinasi-Covid-19?Page=all>.
- Fastyaningsih, A., Priyantika, D., Widyastuti, F. T., Kismartini, K., & Herawati, A. R. (2021). Keberhasilan Aplikasi PeduliLindungi terhadap Kebijakan Percepatan Vaksinasi dan Akses Pelayanan Publik di Indonesia. *GEMA PUBLICA: Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 95–109.
- Ganti, A. (2021, July 21). Rational Choice Theory. Retrieved from <https://Www.Investopedia.Com/Terms/r/Rational-Choice-Theory.Asp>.
- Hamzelou, J. (2020, March 28). World in Lockdown. *New Scientist*, 245(3275), 7.
- Herdiana, D. (2021). Aplikasi Peduli Lindungi: Perlindungan Masyarakat dalam Mengakses Fasilitas Publik di Masa Pemberlakuan Kebijakan PPKM. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(6), 1685–1694.
- Holmes, E. A., O'Connor, R. C., Perry, V. H., Tracey, I., Wessely, S., Arseneault, L., ... Bullmore, E. (2020, June 1). Multidisciplinary research priorities for the COVID-19 pandemic: a call for action for mental health science. *The Lancet Psychiatry*. Elsevier Ltd. Retrieved from [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(20\)30168-1](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30168-1)
- Jemadu, L., & Prastya, D. (2021, September 24). Koinfo Ceritakan Awal Mula Pembuatan Aplikasi PeduliLindungi. Retrieved from <https://Www.Suara.Com/Tekno/2021/09/24/222006/Koinfo-Ceritakan-Awal-Mula-Pembuatan-Aplikasi-Pedulilindungi>.
- Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak. *Prosiding Simposium Nasional Keuangan Negara 2020*, 2(1), 995–1115.
- Kurniawati, Khadapi, M., Riana, D., Arfian, A., Rahmawati, E., & Heriyanto. (2020). Public Acceptance of Pedulilindungi Application in the Acceleration of Corona Virus (Covid-19) Handling. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1641). IOP Publishing Ltd. Retrieved from <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1641/1/012026>
- Li, J., & Guo, X. (2020). *COVID-19 Contact-tracing Apps: a Survey on the Global Deployment and Challenges*. Retrieved from <https://doi.org/10.48550/arXiv.2005.03599>
- Manullang, S. O., & Nurwanty, I. I. (2022). Kajian Sosiologi Hukum Budaya Scan Aplikasi

- Peduli Lindungi Pada Kawasan Publik di Kota Besar. *Binamulia Hukum*, 10(2), 187–193. Retrieved from <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.631>
- Martinadhia, D. T., Rusyda, M. H., & Saputra, R. H. H. (2021). Analisis Permasalahan Pada Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dalam Perspektif Hukum Nasional. *Padjajaran Law Review*, 9(2).
- Pranita, E. (2020, April 2). Indonesia Tak Pilih Lockdown sebagai Solusi, Ini Alasannya.... Retrieved from <https://Www.Kompas.Com/Sains/Read/2020/04/02/110000123/Indonesia-Tak-Pilih-Lockdown-Sebagai-Solusi-Ini-Alasannya-?Page=all>.
- Putri, C. E., & Hamzah, R. E. (2021). APLIKASI PEDULILINDUNGI MITIGASI BENCANA COVID-19 DI INDONESIA. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 4(1), 66–78.
- Rachmatunnisa. (2021, September 9). Ini 15 Masalah di Aplikasi PeduliLindungi yang Harus Diperbaiki. Retrieved from <https://Inet.Detik.Com/Security/d-5716818/Ini-15-Masalah-Di-Aplikasi-Pedulilindungi-Yang-Harus-Diperbaiki>.
- Rahman, A. (2021, September 26). Rendahnya Kepercayaan Masyarakat akan Pengaruh Penerapan Aplikasi PeduliLindungi. Retrieved from <https://Www.Merdeka.Com/Uang/Rendahnya-a-Kepercayaan-Masyarakat-Akan-Pengaruh-Penerapan-Aplikasi-Pedulilindungi.Html>.
- Sebayang, R. (2020, March 16). Termasuk China, Ini 11 Negara yang Lockdown Negara Covid-19. Retrieved from <https://Www.Cnbcindonesia.Com/News/20200316115516-4-145119/Termasuk-China-Ini-11-Negara-Yang-Lockdown-Gegara-Covid-19>.
- Simorangkir, T. (2021, August 20). Here are Countries That Utilize the Check-In and Tracing Systems. Retrieved from <https://Corona.Jakarta.Go.Id/En/Artikel/Menegok-Sistem-Check-in-Dan-Tracing-Di-Negara-Negara-Lain>.
- Sitompul, T. H., Meilani, P., Salsabila, S., & Hariwangi, L. L. (2021). SILCAK: Bagaimana Penggunaan Aplikasi Pelacakan Kasus Kontak Erat COVID-19 di Indonesia. *Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM)*, 9(2), 127–137. Retrieved from <https://doi.org/10.47007/inohim.v9i2.357>
- Utami, Y. P. D., Pinzon, R. T., & Meliala, A. (2021). Evaluasi Kesiapan Rumah Sakit Menghadapi Bencana Non-Alam: Studi Kasus Covid-19 di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI*, 10(02), 100–106.
- Warren, G. W., Lofstedt, R., & Wardman, J. K. (2021). COVID-19: the winter lockdown strategy in five European nations. *Journal of Risk Research*, 24(3–4), 267–293. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/13669877.2021.1891802>
- Wijayanto, H., Daryono, D., & Nasiroh, S. (2021). Analisis Forensik Pada Aplikasi Peduli Lindungi Terhadap Kebocoran Data Pribadi. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIKomsin)*, 9(2), 11. Retrieved from <https://doi.org/10.30646/tikomsin.v9i2.572>